

Efektivitas Pelayanan Aparat Kampung dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kampung Yanggandur Kabupaten Merauke

Hubertus Oja¹⁾; Hesty Tambajong²⁾; Adriana Letsoin³⁾

¹²³ Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Papua Selatan, Indonesia

Email: oja@unmus.ac.id

(Diterima Februari 2025; Disetujui Februari 2025; Dipublikasikan Maret 2025)

Abstrak

Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada semua elemen masyarakat tanpa melihat status sosial demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kab.Merauke dalam pelaksanaan pelayanan belum berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena masih kurangnya rasa tanggung jawab pemerintah terkhususnya aparat kampung dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kurangnya inisiatif para aparat kampung untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan juga minimnya fasilitas kantor kampung sehingga segala aktivitas tidak berjalan dengan baik dan efisien. Bagi Aparat kampung Yanggandur agar bisa meningkatkan lagi kualitas pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dan juga membangun hubungan dengan pendekatan partisipatif yang lebih dengan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan akan membuahkan hasil yang baik.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Aparat kampung

Abstract

Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency has the task of providing services to all elements of society regardless of social status in order to provide excellent service to the community. The purpose of this study is to determine the Effectiveness of Village Officials in Improving Services in Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. The results of this study illustrate that the effectiveness of the work of village officials in improving services in Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency in the implementation of services has not been carried out effectively. This happens because there is still a lack of government responsibility, especially village officials in providing good services to the community. The initiative of the village officials to adapt to the community environment and also the lack of village office facilities so that all activities do not run well and efficiently. For the Yanggandur village apparatus in order to improve the quality of service, meet the needs of the community well and also build relationships with a more participatory approach with the community so that the services provided will produce good results.

Keywords: *Effectiveness, Service, Village Apparatus*

PENDAHULUAN

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipercayakan kepada kepala desa beserta perangkat pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan amatan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa dan aparat desa lainnya diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan administrasi.

Berpijak pada tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan yang ada sebagaimana fungsinya, maka diperlukannya pelaksanaan kerja dalam setiap tahun melalui rencana kerja pemerintah desa. Rencana kerja pemerintah desa disusun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya maka dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa perlu untuk dapat melaksanakan setiap program kerja yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Beni (2016:69) Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kirannya pelayanan publik memuat hal-hal pokok yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Khususnya Pemerintah Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke, rakyat dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja aparatur desa dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan. Dilihat dari pelayanan, diperlukan peningkatan pelayanan dengan harapan layanan yang diberikan agar dapat diandalkan, akurat, hemat biaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena tugas utama pegawai pemerintah adalah melayani masyarakat dengan itikad baik dan itikad baik tanpa memanfaatkan status dan wewenang yang diamanatkan. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah pada kinerja pelayanan publik untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan instansi pemerintah yang didukung oleh sumber daya Pemerintah Desa.

Terbukti saat ini masih ditemui masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan administrasi seperti pelaksanaan untuk mendapatkan keterangan, dan surat lainnya masih membutuhkan waktu terlalu lama sehingga masyarakat merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan. Masalah nyata proses pelayanan umum, terutama pengurusan serta pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu (surat keterangan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan) dan surat keterangan lainnya. Seperti pengalaman yang dialami sebagian masyarakat yang dimana mereka merasakan ada

desa dapat mempengaruhi kinerja instansi secara keseluruhan sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik.

Pemerintahan Desa juga merupakan organisasi pemerintah terdepan didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu sistem. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Mengacu pada rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dipakai seseorang peneliti untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Menurut (Sugiyono 2006), teknik pengumpulan data ialah suatu metode atau cara yang dipakai untuk memperoleh atau mendapatkan apa yang diperlukan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles et al., 2014).

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini terkait dengan Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke". Maka penulis menemukan beberapa masalah dan penyebab yang ditemui pada saat penelitian berlangsung, penulis membagi menjadi 3 indikator yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan tujuan dalam pelayanan

Ketepatan tujuan dalam pelayanan merupakan suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan pada orang lain, baik berupa materi maupun non materi sehingga orang tersebut bisa mengatasi masalah. Suparlan (2000). Dalam penjelasan bagian ini penulis meramuh efektivitas kerja yang dilakukan oleh aparat kampung yang dituangkan dalam satu rangkaian hasil wawancara penelitian. bahwa pada dasarnya aparat memahami hanya saja kurangnya keaktifan dari pada aparat kampung sendiri yang membuat segala proses pelayan dan juga pembangunan menjadi terhambat. Bentuk pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat karena Kurangnya kesadaran dari pada aparat kampung dalam memberikan pelayanan yang pada akhirnya membuat pelayanan belum mencapai harapan dari masyarakat. Berlandaskan hasil wawancara yang sebagaimana dikatakan oleh beberapa nara sumber yang diwawancarai mengatrankan bahwa tidak ada pemahaman yang dimiliki aparat kampung dalam segi pembangunan, bentuk pelayanan belum sesuai dengan harapan karena Pelayanan dari aparat kampung belum mencapai harapan dari pada masyarakat, serta Sampai dengan saat ini kantor kampung hanya beroperasi jika danya kunjungan

dari dinas-dinas terkait. Pandangan masyarakat bahwa pada dasarnya pengelolaan dana desa sendiri tidak sesuai dengan harapan masyarakat juga banyak program dari segi pembangunan yang tidak dijalankan, dan Bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung sangat jauh dari harapan masyarakat atau bisa dikatakan kurang baik, untuk aparat kampung juga sangat jarang berada ditempat (Kantor Kampung).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparat kampung tidak memiliki pemahan lebih terkait dengan pekerjaan mereka, sehingga aparat kampung tidak bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Hal inilah yang membuat aparat kampung jarang ditempat kerja karena mereka kurang memahami kinerja mereka. “Aparat kampung bisa dikatakan gagal dalam memahami tujuan dari pada pembangunan kampung, sehingga terhambatnya program-program unggulan dalam proses perkembangan kampung, kualitas pelayanan dari aparat kampung sangat jauh dari harapan masyarakat, karena aparat kampung jarang berada ditempat, mereka akan ada ditempat jika ada kunjungan dari dinas dan juga perayaan HUT RI.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Ketepatan Tujuan Dalam Pelayanan kerja aparat kampung yanggandur masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak aparat yang kurang memahami kinerja yang seharusnya dikerjakan dan masih banyak aparat kampung yang masih kurang memahami tentang pelayanan baik dari segi pembangunan dan bentuk pelayanan apa saja yang seharusnya diberikan pada masyarakat. aparat kampung belum bisa memahami pelayanan apa saja yang harus mereka lakukan, sehingga banyak pelayanan yang terhambat akibat dari ketidaktahuan aparat. Hal ini juga mengakibatkan banyak aparat yang jarang ke kantor karena mereka kurang paham tentang kinerja mereka selaku aparat kampung.

2. Integrasi dalam pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2020) integritas dalam pelayanan merupakan suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki sebuah potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Dalam penjelasan bagian ini penulis meramuh efektivitas kerja yang dilakukan oleh aparat kampung yang dituangkan dalam satu rangkaian hasil wawancara penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh informan mengarakan tidak adanya keaktifan dari pada aparat kampung membuat segala bentuk program dan juga sosialisasi menjadi tidak berjalan, untuk memberi keluhan juga kepada aparat tidak ada tanggapan dari para aparat kampung terhadap masyarakat. Minimsnya sosialisasi aparat kampung dengan masyarakat kampung menyebabkan proses pelayanan menjadi tidak efektif. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa sosialisasi hanya akan dilakukan jika adanya penyuluhan atau hanya melalui musyawarah kampung, aparat juga Sangat kurangnya kesadaran dalam menanggapi keluhan masyarakat. Pelayanan yang tidak dilaksanakan oleh aparat kampung seperti tidak mengadakan sosialisasi, dan juga tidak mendengarkan keluhan dan aspirasi dari masyarakat, sehingga sampai saat ini pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan dalam penelitian terkait dengan integritas dalam pelayanan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kampung, hal ini yang menyebabkan banyaknya masalah yang terjadi dan untuk tanggung jawab aparat kampung terkait dengan keluhan masyarakat juga dinilai kurang baik karena untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tidak didengar oleh para aparat kampung.

3. Adaptasi dalam pelayanan

Adaptasi dalam pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan yang baik yang merupakan gagasan ataupun ide kreatif orisonal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan Menteri PANRB No. 32/2014. Dalam penjelasan bagian ini penulis meramuh efektivitas kerja yang dilakukan oleh aparat kampung yang dituangkan dalam satu rangkaian hasil wawancara penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbarapa informan mengatakan bahwa Tidak adanya penyesuaian dari para apat kampung membuat masyarakat menjadi individu yang bergerak tanpa bantuan dari aparat kampung. Aparat kampung kurang berinisiatif dalam pelayanan hal ini yang membuat masyarakat cenderung lebih mandiri dan tidak mengandalkan aparat dalam segi pelayanan. Ditegaskan lagi oleh informan yang lain dari masyarakat mengatakan bahwa tidak ada kesadaran yang dimiliki oleh aparat kampung untuk menyesuaikan diri kepada masyarakat, serta masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh aparat kampung untuk beradaptasi kepada masyarakat. Untuk fasilitas kantor kampung sangat kurang hal ini yang membuat segala pelayanan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian terkait dengan Adaptasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparat Kampung Yanggandur belum terlaksanakan dengan baik karena masih kurangnya insiatif dari aparat kampung kepada masyarakat sendiri, dan juga masih kurangnya inisiatif aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkhususnya pada kantor kampung juga belum ada fasilitas yang memadai sehingga pelayanan yang dilakukan semakin terhambat karena kurangnya perhatian dari pemerintah kampung. Minimnya penyesuaian diri oleh aparat kampung kepada masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh aparat kampung untuk beradaptasi kepada masyarakat. Hal yang jadi masalah dalam kantor kampung yaitu kurangnya fasilitas sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik.

PEMBAHASAN

Dalam bagian pembahasan ini penulis ingin mendeskripsikan hasil penelitian dalam suatu pembahasan agar memperjelas dalam menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan intsrumen indikator yang diteliti terkait Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota, adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Tujuan Dalam pelayanan

Ketetapan tujuan dalam pelayanan yaitu melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Budiana

(2007:53), dalam keterkaitan dengan penelitian ini yaitu pada aspek ketepatan tujuan dalam pelayanan yang diteliti terkait dengan efektivitas kerja aparat kampung dalam meningkatkan pelayanan di Kampung Yanggandur.

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan tujuan dalam pelayanan menunjukkan bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparat kampung yaitu untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, harapan dan tujuan namun dalam hal ini aparat Kampung Yanggandur belum bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masih kurangnya pengetahuan terkait dengan kinerja yang harus dilakukan sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik terkhususnya pada pembangunan, dampak kurangnya tanggung jawab ini memberikan turunya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar yang diharapkan.

Ketidaktahuan aparat kampung memberikan dampak yang sangat besar karena mengakibatkan program dan kebijakan tidak dilaksanakan dengan efektif, yang bisa mengakibatkan pemborosan sumber daya atau hasil yang tidak optimal. Pentingnya bagi aparat untuk memiliki pelatihan dan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab dan pemahaman yang baik sehingga mereka dapat memastikan pelayanan yang diberikan akan efektif dan memadai kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah aparat kampung yang kurang beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, beberapa solusi dapat diterapkan.

Pertama, perlu adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat kampung. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam manajemen, komunikasi, dan pemahaman tentang dinamika sosial serta budaya lokal. Dengan pelatihan yang tepat, aparat kampung akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah krusial. Melalui forum-forum diskusi, musyawarah, atau survei masyarakat, aparat kampung dapat memperoleh masukan langsung dari warga tentang masalah yang mereka hadapi dan harapan mereka terhadap program yang ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan adaptasi aparat kampung terhadap kondisi lokal, tetapi juga memperkuat dukungan dan kerjasama antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Ketepatan tujuan dalam pelayanan bagi aparat kampung sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Para aparat kampung harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah mereka. Ini melibatkan pemetaan masalah yang ada, identifikasi prioritas, serta pengembangan strategi yang relevan dan efektif. Ketepatan tujuan juga mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap dampak dari kebijakan yang diambil, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan atau kondisi baru.

Selain itu, ketepatan tujuan dalam pelayanan bagi aparat kampung juga melibatkan komunikasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Agar program serta kebijakan dapat berjalan dengan baik, aparat harus mampu berinteraksi secara efektif dengan warga untuk memahami aspirasi dan umpan balik mereka, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan program, diharapkan akan tercipta rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap hasil yang dicapai. Hal ini akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dan meningkatkan keberhasilan implementasi program-program kampung.

Hal ini sependapat dengan Robert D. Putnam (2000) yang mengatakan bahwa aparat yang terampil dan kompeten akan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. Oleh karena itu pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi aparat kampung dalam aktifitas pelayanan menjadi point penting untuk mewujudkan aparat kampung yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan yang di wilayah perkampungan. Hal ini diperkuat lagi oleh pendapat Surbakti M (2001) yang mengatakan pelatihan bagi aparat pemerintah maupun kampung sangat penting karena mereka merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemahaman yang baik tentang tanggung jawab merupakan tugas mereka untuk membantu melaksanakan kebijakan secara efektif.

2. Integrasi dalam pelayanan

Integrasi dalam pelayanan yaitu melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Budiana (2007:53), dalam keterkaitan dengan penelitian ini yaitu pada aspek ketepatan tujuan dalam pelayanan yang diteliti terkait dengan efektivitas kerja aparat kampung dalam meningkatkan pelayanan di kampung yanggandur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan integrasi dalam pelayanan mencakup kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat, hal ini mencakup pelayanan administrasi seperti surat menyurat, pelayanan sosial seperti mendapatkan bantuan sosial contoh BLT yang digunakan untuk memberikan dukungan holistik dan terorganisasi. Namun dalam kenyataannya integrasi dalam pelayanan pada kampung yanggandur belum bisa dilaksanakan dengan baik karena kurangnya inisiatif dari aparat kampung untuk memberikan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya perhatian aparat kepada masyarakat dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh aparat setempat.

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini yakni aparat kampung yang kurang berinisiatif untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, berbagai dampak negatif dapat muncul yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program-program kampung. Tanpa adanya komunikasi dan interaksi yang aktif, aparat kampung mungkin kesulitan dalam memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan kebijakan atau layanan yang tidak relevan atau bahkan kontraproduktif, karena tidak sesuai dengan realitas dan harapan warga. Selain itu, kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan kesan bahwa aparat kampung tidak peduli atau tidak responsif terhadap masyarakat, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan kampung.

Integrasi pelayanan aparat kampung merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan dan program yang dikelola oleh aparat kampung dalam satu sistem yang terkoordinasi dan efisien. Hal ini melibatkan penggabungan sumber daya, informasi,

dan upaya antara berbagai unit layanan di tingkat kampung untuk mengurangi tumpang tindih, meningkatkan efektivitas, dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Dengan integrasi ini, aparat kampung dapat memastikan bahwa semua layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga program kesejahteraan sosial, saling mendukung dan terhubung dengan baik, sehingga menciptakan sistem yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai integrasi pelayanan yang efektif, diperlukan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi serta pelatihan bagi aparat kampung. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan data dan informasi dari berbagai layanan dapat diakses dan dikelola secara bersamaan, mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat proses pelayanan. Sementara itu untuk, pelatihan bagi aparat kampung penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem ini, serta memahami prosedur dan kebijakan yang terkait dengan layanan yang mereka kelola.

Pelatihan ini juga membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar aparat, yang penting untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan berjalan secara sinergis. Setelah itu Evaluasi dan umpan balik dari masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses integrasi pelayanan. Melalui mekanisme evaluasi yang rutin, aparat kampung dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sistem pelayanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Umpan balik dari masyarakat membantu aparat kampung untuk memahami bagaimana layanan yang diberikan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi, integrasi pelayanan dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan aktual, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung..

Untuk mengatasi masalah tersebut, aparat kampung harus melakukan langkah-langkah proaktif perlu diambil. Pertama, penting untuk mendorong aparat kampung agar secara rutin melakukan kunjungan dan dialog dengan masyarakat, melalui forum-forum seperti musyawarah desa, rapat terbuka, atau sesi konsultasi. Melalui interaksi langsung, aparat kampung dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Kedua, pelatihan tentang keterampilan komunikasi dan partisipasi publik bisa menjadi solusi efektif. Pelatihan ini akan membantu aparat kampung untuk lebih percaya diri dan mahir dalam berkomunikasi serta berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam berinteraksi dan merespons kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, menciptakan mekanisme umpan balik yang sistematis juga dapat membantu. Dengan menyediakan saluran yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan, aparat kampung dapat lebih cepat mengetahui dan merespons isu-isu yang muncul. Umpan balik ini tidak hanya membantu aparat kampung dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, tetapi juga memberikan rasa keterlibatan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi dan dukungan mereka terhadap kebijakan dan program yang diterapkan.

Dilihat dari tujuan integrasi yaitu untuk mengurangi biroksi, dan mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, namun pada kenyataannya kampung yanggandur belum bisa dilaksanakan dengan baik karena kurangnya tanggung jawab dari aparatur tersebut. Dengan adanya integrasi ini di harapkan pelayanan dikampung dapat berjalan lancar dan efektif serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih optimal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat UNDP (2014) yang mengatakan bahwa pentingnya integrasi dalam pelayanan yaitu untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas administrasi pemerintah terkhususnya di kampung. Hal ini juga sependapat dengan Siti Zuhro (2010) yang menyatakan bahwa perlunya integrasi dalam pelayanan publik untuk mendukung suatu reformasi birokrasi yang baru dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

3. Adaptasi dalam pelayanan

Adaptasi dalam pelayanan aparat kampung merujuk pada penyesuaian dan pembaruan cara kerja serta pelayanan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Keterkaitan adaptasi dalam pelayanan dengan penelitian ini yaitu pada aspek ketepatan tujuan dalam pelayanan yang diteliti terkait dengan efektivitas kerja aparat kampung dalam meningkatkan pelayanan di Kampung Yanggandur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam hal adaptasi dalam pelayanan belum dilaksanakan dengan baik karena aparat kampung setempat belum bisa beradaptasi dengan baik dilingkungan masyarakat, terkhususnya masyarakat lokal disana, hal ini mengakibatkan pelayanan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pendekatan yang holistik kepada masyarakat. Dalam pelayanan aparat kampung belum memiliki inisiatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat karena banyak urusan yang seharusnya dilakukan dengan melibatkan aparat menjadi tidak melibatkan atau dengan kata lain masyarakat lebih mandiri. Adaptasi dalam pelayanan juga harus didukung dengan fasilitas kantor yang memadai guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas kantor yang memadai akan mempermudah pelayanan aparat kepada masyarakat namun pada kantor kampung yanggandur belum adanya fasilitas yang memadai sehingga hal ini membuat banyak pelayanan yang tidak bisa berjalan sebagai semestinya.

Adaptasi pelayanan aparat kampung merupakan suatu proses penyesuaian dan pengembangan layanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang terus berubah. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat kampung untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan efektif dan relevan. Aparat kampung perlu secara aktif mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan mereka agar pelayanan yang diberikan dapat menjawab tantangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan demografi, kebutuhan ekonomi, atau isu-isu sosial yang baru muncul.

Pentingnya bagi aparat kampung untuk mengembangkan mekanisme yang ada serta adaptasi yang fleksibel dan responsif. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data masyarakat, sehingga memudahkan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang berkembang. Selain itu, aparat kampung harus terlibat dalam proses

pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan terlibat dalam perencanaan layanan. Dengan cara ini, kebijakan dan program dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan aktual masyarakat, dan bukan sekadar berdasarkan asumsi atau data yang usang.

Evaluasi berkala yang secara terus menerus akan memberikan umpan balik dari masyarakat adalah komponen kunci dalam proses adaptasi pelayanan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, aparat kampung dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam layanan yang diberikan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Umpan balik langsung dari masyarakat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas pelayanan dan area yang perlu ditingkatkan. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan inklusif, sehingga masyarakat merasa terlibat dan dihargai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan oleh aparat kampung.

Untuk mengatasi masalah terkait dengan fasilitas kantor kampung yang kurang maka perlu mengambil langkah-langkah yaitu Pertama, evaluasi dan prioritas kebutuhan fasilitas harus dilakukan secara menyeluruh, evaluasi ini mencakup identifikasi kekurangan yang ada, seperti kurangnya peralatan kantor, fasilitas komunikasi, atau ruang kerja yang memadai. Berdasarkan evaluasi ini, aparat kampung dapat menyusun rencana pengadaan dan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Kedua, aparat kampung bisa mencoba untuk mencari sumber pendanaan tambahan adalah langkah penting untuk meningkatkan fasilitas kantor kampung. Ini bisa melibatkan pengajuan proposal untuk mendapatkan dana dari pemerintah daerah atau pusat, kerjasama dengan sektor swasta, atau bahkan program bantuan dari lembaga donor. Selain itu, upaya penggalangan dana dari masyarakat atau organisasi lokal juga bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan tambahan dana. Dengan adanya dukungan finansial yang cukup, fasilitas kantor dapat diperbaiki atau diperbarui sesuai dengan standar yang diperlukan.

Langkah yang terakhir yaitu, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan juga sangat penting. Setelah fasilitas diperbaiki atau ditingkatkan, penting untuk memiliki rencana pemeliharaan rutin agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan berfungsi dengan optimal. Pengelolaan yang baik meliputi penjadwalan pemeliharaan, perbaikan kecil secara berkala, dan pengawasan penggunaan fasilitas agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat kegiatan operasional kantor. Dengan langkah-langkah ini, fasilitas kantor kampung dapat mendukung efektivitas kerja aparat kampung dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Adaptasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemerintah kampung itu sendiri. Eko Prasojito (2020) mengatakan bahwa adaptasi dalam pelayanan merupakan bentuk peningkatan kualitas layanan dan penggunaan teknologi yang tepat dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan, dan juga dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Muhhammad syafii (2011) berpendapat bahwa adaptasi dalam pelayanan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan

hubungan yang baik antara pemerintah kampung dan warga melalui peningkatan transparansi dan partisipasi.

Mengacu pada hasil pembahasan dari ketiga indikator yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja aparat Kampung Yanggandur dalam memberikan sudah dilakukan tetapi tetapi kurang efektif, hal ini terlihat bahwa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat baik dari segi waktu pelayanan karena masih kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya adaptasi dari aparat kampung yang mengakibatkan dari berbagai macam pelayanan yang harus dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Pelayanan yang efektif dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menunjukkan bahwa Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kab.Merauke dalam pelaksanaan pelayanan belum berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena masih kurangnya rasa tanggung jawab pemerintah terkhususnya aparat kampung dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kurangnya inisiatif para aparat kampung untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan juga minimnya fasilitas kantor kampung sehingga segala aktivitas tidak berjalan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis peroleh, maka agar dalam hal Efektivitas Kerja Aparat Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten. Merauke dapat berjalan dengan baik, maka penulis berikan saran sebagai berikut: Bagi Aparat kampung Yanggandur agar bisa meningkatkan lagi kualitas pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dan juga membangun hubungan dengan pendekatan partisipatif yang lebih dengan masyarakat. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan nantinya, menyampaikan masukan secara konstruktif dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan para aparat sehingga nantinya tidak ada mis komunikasi. Kepada pemerintah kabupaten Merauke, agar lebih memperhatikan kinerja para aparat kampung dengan memberikan pelatihan secara terus-menerus guna untuk melahirkan para aparat yang baik dan bertanggung jawab, serta meningkatkan lagi infrastruktur desa terkhususnya pembangunan didesa, dengan begitu pelayanan yang dilakukan di kampung akan berjalan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit, S. (2021). Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Engel. (2014). gabungan Teori Administrasi. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Departemen Sosial Republik Indonesia (2004).Acuhan Umum Pelayanan Sosial Anak di Panti Sosial Asuhan Anak.Jakarta: Depertemen Sosial RI

- Handayani, H. P. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam. *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Cross-case data analysis. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *ASSIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 17. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4630>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga,
- Reyes. (2018). Indikator Pelayanan Publik. *Kualitas Pelayanan*, 3(1), 1–26. [file:///C:/Users/Hp/Downloads/BAB II \(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/BAB%20II%20(1).pdf)
- Roza, D., & Laurensius, A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(Juni), 606–624.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Siti Nurhafika1 & Dedi Kusuma Habibie. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Rokan Hilir Jsdmu: *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul* Vol. 2, No. 2, Juni 2022
- Tangkilisan, N. H. ((2005). *Menejemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Yuningsih, D. K. & T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Ejournal3 Undip*, 6(2), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/183710-ID-efektivitas-organisasi-dalam-penyelengga.pdf>